

STUDI TENTANG PERISTIWA 17 OKTOBER 1952

S K R I P S I



NILAI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh :

Dwiana Destim Dilia Kasumawati

NIM : BIE 195 210

5

Angka	19 JUL 2000	Klasifikasi	959.8 KUS S
Tanggal Terbit	10. 2. 312		

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2000

MOTTO :

"Bung Karno mengatakan bahwa hanya bangsa yang dapat memetik pelajaran dari masa yang silam, dan cakap mempergunakan pengalaman-pengalamannya dalam menghadapi masa depan dapatlah bangsa itu menjadi bangsa yang besar (Abdul Syukur dalam Sena, 1998:7)."



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Soeparno dan Ibunda Titiek Khatarina tercinta yang telah berjuang dan berdoa demi keberhasilanku**
- 2. Kakakku Eka Meina Seputra dan adikku Danu Aptri Nurgana tersayang**
- 3. Bibinda Amaliyah dan Supanati yang telah memberi dorongan semangat**
- 4. Adik-adikku Vera, Vicarulin, dan si centil Vprilia**
- 5. Sahib-sahibku di Kalmantan X/15**
- 6. Guru-guruku yang terhormat**
- 7. Sahabat-sahabatku angkatan 1995**
- 8. Almamater yang kubanggakan**

STUDI TENTANG PERISTIWA 17 OKTOBER 1952

SKRIPSI


Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh:

Nama Mahasiswa : Dwiana Destim Dilia Kusumawati
NIM : BIE195210
Angkatan : 1995
Daerah Asal : Bondowoso
Tempat dan Tanggal Lahir : Bondowoso, 6 Desember 1976
Jurusan/Program : Pendidikan IPS/Pendidikan Sejarah


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



DRS. H. CHOESNOEL HADI
NIP. 130 145 576

Pembimbing II,



DRS. SUMARNO
NIP. 131 405 352

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji, dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai skripsi

Pada hari : Jum'at
Tanggal : 30 Juni 2000
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

DRS. DWI SUPARNO, M.HUM
NIP. 131 274 727

Sekretaris,

DRS. SUMARNO
NIP. 131 405 352

Anggota :

1. DRA. SRI HANDAYANI
NIP. 131 472 786
2. DRS. H. CHOESNOEL HADI
NIP. 130 145 576

Mengetahui

Dekan,

DRS. SOEKARDJO B.W.
NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segenap rahmat, taufik dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Studi Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952".

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
3. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Universitas Jember
4. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
5. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
6. Dosen Pembimbing I dan II
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini

Penulis menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan sejarah pada khususnya.

Jember, 30 Juni 2000

Penulis

RINGKASAN

Dwiana Destim Dilia Kusumawati, BE195210, Juni 2000, Studi Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pembimbing : (I) Drs. H. Choesnoel Hadi
(II) Drs. Sumarno

Kata Kunci : Peristiwa 17 Oktober 1952 .

Indonesia sejak kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, menggunakan UUD 1950 dan menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Masa ini diwarnai dengan jatuh bangunnya kabinet pemerintahan dalam waktu yang sangat singkat, karena adanya pertentangan partai politik. Periode 1950 sampai 1952 timbul perbedaan pendapat antara militer dan sipil. Pertentangan ini diawali dengan adanya rencana rasionalisasi militer dari KSAD Kolonel A.H. Nasution sebagai upaya penghematan anggaran belanja negara. Bermula dari pertentangan antara kelompok militer dan sipil karena anggota parlemen terlalu campur tangan kepada beleid/kebijaksanaan pimpinan Angkatan Perang dan tidak disiplinnya seorang bawahan terhadap atasannya di kalangan militer, serta didukung oleh adanya situasi politik yang kacau, melahirkan suatu demonstrasi rakyat yang dikenal dengan nama Peristiwa 17 Oktober 1952. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, sebab Peristiwa 17 Oktober 1952 ini merupakan awal terjunnya militer dalam bidang sosial politik.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah proses terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 ?

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan mengkaji secara jelas dan mendalam tentang Peristiwa 17 Oktober 1952. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) bagi penulis, merupakan wahana latihan pengembangan ilmu, sekaligus dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang Peristiwa 17 Oktober 1952; (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memperluas pengetahuan untuk materi Sejarah Nasional Indonesia; (3) bagi generasi penerus perjuangan bangsa, baik sipil maupun militer, agar peristiwa yang merugikan bangsa dan negara itu jangan terulang lagi; (4) bagi pembaca pada umumnya, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peristiwa 17 Oktober 1952, baik segi positif maupun negatifnya; (5) bagi almamater, penelitian ini akan menambah perbendaharaan khasanah keputakaan di UPT Perpustakaan Universitas Jember.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 9 bulan terhitung sejak September 1999 sampai Juni 2000. Tenggang waktu tersebut dimulai dari kegiatan pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi hingga menjadi naskah skripsi. Penelitian ini merupakan penelitian bibliografis atau studi keputakaan. Metode penentuan tempat yang

digunakan adalah purposive sampling. Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah perpustakaan Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah, dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumenter. Metode analisis data menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif.

Berdasarkan permasalahan, tinjauan kepustakaan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) latar belakang Peristiwa 17 Oktober 1952 karena adanya rasionalisasi militer sebagai usaha untuk mengudakan penghematan anggaran belanja negara dan tidak disiplinnya seorang bawahan terhadap atasannya di kalangan militer serta terlalu besarnya campur tangan anggota-anggota parlemen terhadap beleid pimpinan Angkatan Darat; (2) proses terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah demonstrasi rakyat di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen karena terlalu jauh mencampuri urusan intern TNI AD, dan segera diadakan pemilihan umum; (3) dampak Peristiwa 17 Oktober menyebabkan perpecahan dalam tubuh AD menjadi dua kelompok yaitu kelompok "pro Peristiwa 17 Oktober" dan kelompok "anti Peristiwa 17 Oktober".

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya banyak membaca literatur tentang Sejarah Nasional Indonesia, sehingga dapat menambah dan memperluas pengetahuan; (2) bagi penerus perjuangan bangsa, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar peristiwa yang merugikan bangsa dan negara itu tidak terulang lagi; (3) bagi pembaca pada umumnya, hendaknya mengetahui segi positif dan negatif agar Peristiwa 17 Oktober 1952 dijadikan pelajaran di masa yang akan datang; (4) bagi almamater, hendaknya menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 untuk memperkaya perpustakaan di UPT Universitas Jember.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Pengajuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	4
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan	4
1.3.1 Ruang Lingkup	4
1.3.2 Rumusan Permasalahan	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Situasi Kondisi Indonesia Menjelang Peristiwa 17 Oktober 1952	7
2.2 Peristiwa 17 Oktober 1952	12
2.2.1 Latar Belakang	12
2.2.1.1 Rasionalisasi Militer	13
2.2.1.2 Indisipliner Seorang Bawahan Terhadap Atasan ..	15
2.2.1.3 Campur Tangan Parlemen dalam Tubuh Militer ..	16
2.2.2 Tujuan/Sasaran	18

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Pengertian Metode Penelitian	21
3.2	Pengertian Metode Penelitian Sejarah	22
3.2.1	Heuristik	23
3.2.2	Kritik	24
3.2.3	Interpretasi	25
3.3.4	Historiografi	26
3.3	Metode Penentuan Tempat Penelitian	27
3.4	Metode Pengumpulan Data	28
3.5	Metode Analisis Data	28
3.5.1	Teknik Logika Komparatif	29
3.5.2	Teknik Logika Induktif	29
BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952	31
4.1.1	Demonstrasi Rakyat di Jakarta	31
4.1.2	Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952	37
4.2	Dampak Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952	38
4.2.1	Bidang Militer	38
4.2.2	Bidang Politik	42
4.2.3	Bidang Hankam	49
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	54
	KEPUSTAKAAN	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Penelitian
 2. Skema Peristiwa 17 Oktober 1952
 3. Surat Keterangan Studi Literatur dari Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember
 4. Lembar Konsultasi Penyusunan Skripsi
- RIWAYAT HIDUP PENULIS (RINGKAS)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Militer adalah salah satu organ yang harus dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Militer merupakan satu kelompok orang-orang yang diorganisir, yang disiplin, untuk melakukan pertempuran, yang membedakan dari orang-orang sipil. Fungsi militer dalam suatu negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan dan keamanan (Yahya Muhaimin,1982:1-2). Militer dalam semua negara mempunyai pengaruh politik yang luas. Mereka merupakan lambang kedaulatan dan penahan utama bagi kemungkinan serangan terhadap negara, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam (Eric A. Nodlinger,1994:6).

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi dibubarkan dan dibentuk kembali negara kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Marwati Djoenoed,1990:208). Undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Sistem pemerintahan yang dipakai adalah demokrasi parlementer. Dianutnya sistem demokrasi parlementer menyebabkan berkurangnya kekuasaan presiden, mengingat kekuasaan riil sepenuhnya berada ditangan perdana menteri, sedangkan keadaan partai politik dalam masa demokrasi parlementer tumbuh subur. Selain memiliki kekuasaan politik, partai politik juga sebagai penentu dalam pengambilan keputusan politik (M. Rusli Karim,1981:27).

Pada masa demokrasi liberal kabinet jatuh bangun, karena sering mendapat mosi tidak percaya dari parlemen (Julius Pour,1997:168). Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terdapat 7 buah kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Adakalanya kabinet hanya berumur kurang dari satu tahun, sehingga kabinet tidak dapat melaksanakan programnya sampai selesai. Pada masa ini sarat dengan instabilitas politik atau lebih tepat adalah instabilitas pemerintahan (Hendri Supriyatmono,1994:5). Kabinet yang sering berganti dalam

waktu yang sangat singkat semakin menambah buruk keadaan, karena tujuan yang diprogramkan oleh setiap kabinet tidak tercapai dan menimbulkan kemacetan dalam setiap bidang kehidupan. Disamping itu menimbulkan perselisihan golongan, pertentangan-pertentangan partai politik dan pemberontakan-pemberontakan (Dinas Sejarah TNI AD, 1982:16-20).

Pada periode 1950 sampai 1952 timbul perbcaan pandangan antara militer dan sipil yang sangat antagonis. Pertentangan antara militer dan sipil menjadi sangat meruncing pada masa Kabinet Wilopo, yaitu ditandai dengan meletusnya Peristiwa 17 Oktober 1952, yang telah mengubah konstelasi politik di Indonesia (M. Rusli Karim,1981:28). Peristiwa ini muncul karena adanya rencana dari Kabinet Wilopo untuk mengadakan penghematan anggaran belanja negara dalam segala bidang, termasuk bidang kemiliteran. Hal ini berarti dilakukan reorganisasi dalam tubuh militer dengan memersiapkan para prajurit yang kurang berpotensi.

Staf Kepala Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mempunyai rencana tentang reorganisasi dan demobilisasi militer dan tentara pelajar (TP), bertujuan menjadikan tentara Indonesia sebagai tentara profesional. Rencana ini didukung oleh Hamengku Buwono X sebagai Menteri Pertahanan dan Dr. Soemitro Djohadikusumo sebagai Menteri Keuangan. Namun rencana ini tidak disetujui oleh kalangan TNI sendiri, terutama kelompok Bambang Supeno dan anggota-anggota tentara yang berasal dari bekas Pembela Tanah Air (PETA) dan Laskar-Laskar Rakyat. Mereka mendapat dukungan politik yang cukup besar dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Presiden Soekarno (Yahya Muzaimin, 1982: 67-70).

Beberapa orang TNI-AD yang tidak sependapat dengan kebijaksanaan KSAD telah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengganti KSAD Kolonel A.H. Nasution. Dua orang anggota parlemen, yaitu Betasa Daeng Lalo dan Rondoruwu juga tidak mendukung rencana reorganisasi militer, sehingga di parlemen terjadilah perdebatan yang sengit mengenai masalah angkatan perang (Sekretariat Negara, 1981:68).

Bermula dari pertentangan antara kelompok sipil dengan militer dalam tubuh parlemen tersebut kemudian melahirkan suatu demonstrasi rakyat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952, yakni suatu demonstrasi kepada pemerintah yang menuntut pembubaran parlemen dan kemudian segera melaksanakan pemilu.

Topik mengenai Peristiwa 17 Oktober 1952 tersebut sangat menarik untuk dikaji, sebab hal tersebut merupakan bukti, bahwa sejak diterapkannya demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, kehidupan politik Indonesia justru sering bergolak yang tampak dengan adanya pertentangan politik di parlemen yang berupa kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing untuk memcominasi kekuasaan dalam pemerintahan negara. Peristiwa 17 Oktober ini adalah merupakan awal terjunnya militer dalam bidang sosial politik, karena adanya konflik intern dalam tubuh militer dalam hal ini Angkatan Darat.

Selain faktor kemenarikan diatas, alasan lain yang membuat penulis ingin mengkaji topik tersebut diatas, yaitu karena permasalahan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Sutrisno Hadi dalam bukunya Metodologi Research I, yaitu ; (1) topik masih dalam jangkauan peneliti, (2) tersedianya bahan-bahan atau data yang diperlukan untuk memecahkannya, (3) topik cukup penting untuk diteliti, sebab bila diteliti atau dikaji akan mendatangkan manfaat bagi penulis maupun bagi pengembangan ilmu sejarah, (1985:51). Selain itu juga karena adanya kesediaan dosen pembimbing, serta adanya fasilitas yang menunjang seperti tempat penelitian, tenaga, waktu dan biaya.

Apabila dikaitkan dengan salah satu kompetensi guru yaitu berkaitan dengan penguasaan materi atau bahan pelajaran, maka penelitian ini diharapkan dapat memperluas materi atau bahan pelajaran dan akan menjadi bekal yang sangat berguna apabila menjadi guru sejarah.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penulis memilih permasalahan penelitian ini yang dirumuskan dalam judul " Studi Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952".

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Guna mendapatkan kesamaan pandangan mengenai pengertian atau maksud judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian dari judul penelitian ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peristiwa berarti kejadian luar biasa yang menarik perhatian atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah (1989:573). Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah kejadian luar biasa dan menarik perhatian banyak orang, terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 1952, yakni adanya demonstrasi rakyat di Jakarta, yang bertujuan menuntut kepada pemerintah, supaya presiden membubarkan parlemen dan kemudian segera mengadakan Pemilihan Umum. Jadi pengertian yang penulis maksudkan dalam judul penelitian "Studi tentang Peristiwa 17 Oktober 1952" adalah kajian/penelitian dengan menggunakan waktu dan pikiran yang rasional untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan mendalam tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1952, tepat pada hari Jum'at, yang ketika itu rakyat berdemonstrasi menuntut kepada pemerintah agar presiden membubarkan parlemen dan kemudian segera mengadakan pemilihan umum guna memilih parlemen baru demi tetap utuhnya bangsa dan negara.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup

Melihat sangat kompleksnya permasalahan yang di bahas, maka ruang lingkup permasalahan dalam suatu penelitian sangatlah penting, agar penelitian tidak terjerumus dengan banyaknya data-data yang tidak relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi segi waktu, inti materi yang diteliti, dan tempat yang diteliti.

Ruang lingkup waktu yang diteliti adalah 17 Oktober 1952, yakni pada saat peristiwa demonstrasi rakyat di Jakarta menuntut agar presiden membubarkan

parlemen, dan kemudian menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih parlemen yang baru. Namun perlu penulis tegaskan, bahwa ruang lingkup waktu tersebut tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel, maksudnya dalam pembahasan nanti meyangkut pula kejadian-kejadian sebelum tanggal 17 Oktober 1952 sebagai latar belakang dari peristiwa itu serta kejadian-kejadian setelah tanggal 17 Oktober 1952 sebagai penyelesaian dan dampak terjadinya peristiwa tersebut.

Inti materi yang diteliti pada topik "Peristiwa 17 Oktober 1952" adalah latar belakang, proses terjadinya dan dampak dari Peristiwa 17 Oktober 1952.

Adapun daerah atau tempat peristiwa yang penulis teliti adalah Jakarta, ibukota negara RI, tempat berangsurnya Peristiwa 17 Oktober 1952 itu sendiri.

1.3.2 Rumusan permasalahan

Penelitian tidak akan berjalan dengan lancar dan baik kalau tidak ada suatu rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan dimaksudkan pula sebagai fokus yang membimbing peneliti, agar langkah-langkah penelitiannya dapat terarah dan tidak ngawur.

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952?

Dalam penelitian ini penulis tidak merumuskan hipotesis secara eksplisit dengan alasan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan apa adanya sesuatu peristiwa sejarah dari berbagai aspek. Di dalam penelitian historis yang bersifat deskriptif semacam itu tidak harus dirumuskan hipotesis penelitian secara eksplisit (Winarno Surakhmad, 1990:124).

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi peneliti dalam memecahkan permasalahannya. Berjak dari permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah ingin

mengetahui dan mengkaji secara jelas dan mendalam tentang Peristiwa 17 Oktober 1952.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bagi penulis, merupakan wahana latihan pengembangan ilmu, sekaligus dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang Peristiwa 17 Oktober 1952,
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memperluas pengetahuan untuk materi Sejarah Nasional Indonesia Modern,
3. bagi generasi penerus perjuangan bangsa, baik sipil maupun militer, agar peristiwa yang merugikan bangsa dan negara itu jangan terulang lagi. Sebaliknya agar tetap dijaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan bertumpu pada Pancasila, setiap komponen bangsa tahu akan tugas dan kewajiban masing-masing dengan mengutamakan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing,
4. bagi pembaca pada umumnya, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peristiwa 17 Oktober 1952, baik segi positif maupun negatifnya,
5. bagi almamater, penelitian ini akan menambah perbendaharaan khasanah keputakaan di UPT Perpustakaan Universitas Jember.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Situasi Kondisi Indonesia Menjelang Peristiwa 17 Oktober 1952

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara tiga pihak, yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dan Belanda. KMB diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Konferensi tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, diantaranya didirikannya negara Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku adalah Konstitusi RIS dan diberlakukan mulai tanggal 27 Desember 1949. RIS terdiri dari negara-negara bagian yang meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. Negara-negara bagian menurut pasal 2 Konstitusi RIS ialah negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan, serta satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri (Joenarto, 1996:62-63).

Pembentukan negara federasi itu ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat dari negara-negara bagian di seluruh Indonesia menghendaki pembentukan suatu negara kesatuan. Unitarisme ini juga didukung oleh anggota-anggota Kabinet RIS. Mereka berpendapat bahwa pembentukan negara federal tidak berdasarkan landasan konsepsional. Federalisme merupakan usaha Belanda untuk mengharcurkan Republik Indonesia hasil proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dengan cara memecah belah persatuan.

Akhirnya untuk melaksanakan keinginan rakyat mengenai negara kesatuan, pemerintah Negara Indonesia Timur dan pemerintah Negara Sumatera Timur memberikan mandatnya kepada Pemerintah RIS guna berunding dengan pemerintah RI mengenai pembentukan Negara Kesatuan. Realisasi pembentukan negara kesatuan terlaksana setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam tersebut

dinyatakan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan pembentukan Negara Kesatuan. RIS resmi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 (Marwati Djoened, 1990: 205-206).

Indonesia sejak kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 ditetapkan dengan UU No.7 tahun 1950. Perubahan konstitusi ini memang diperbolehkan dalam pasal 190. Perubahan ini dilaksanakan dengan ditandatanganinya "Piagam Persetujuan", yang menetapkan bahwa UUD Negara Kesatuan yang akan dibentuk itu dibuat dengan mengubah UUD 1949 sedemikian rupa, sehingga esensial UUD 1945 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari UUD 1949 termasuk didalamnya (Ismail Suny, 1983:119-121).

Sistem pemerintahan yang dipakai adalah "sistem parlementer". Menurut sistem pemerintahan parlementer, kedudukan kepala negara (presiden) tidak dapat diganggu gugat dan tidak mempunyai tanggung jawab pemerintahan; kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen; susunan personalia dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak di dalam parlemen; masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti berapa lamanya; kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen dan sebaliknya parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah. Organ resmi di dalam parlemen adalah partai politik (Achmad Sanusi, 1958:38).

Dianutnya sistem pemerintahan parlementer menyebabkan berkurangnya kekuasaan presiden, mengingat kekuasaan riil sepenuhnya berada di tangan perdana menteri, oleh karena itu keadaan partai politik pada masa itu tumbuh subur. Partai politik memiliki kekuasaan politik sekaligus penentu dalam pengambilan keputusan politik atau *decision maker* (Muhammad Rusli Karim, 1981:27).

Periode 1950-an disebut dekade "demokrasi liberal" yang kemudian secara umum disebut "demokrasi parlementer". Masa ini dapat dikatakan satu-satunya masa dimana ditemukan iklim yang benar-benar memberikan angin bagi tumbuh suburnya partai politik (Muhammad Rusli Karim, 1983:107). Herbert Feith mengatakan bahwa

periode 1950-an disebut masa meraba-raba, mengarungi lautan yang tidak dikeral, mencari doktrin, kebijakan-kebijakan serta metode-metode pemerintahan untuk mengisi kemerdekaan yang baru diperoleh (1995:201).

Kedudukan pemerintahan pada masa pemerintahan parlementer tidak pernah stabil, karena sarat dengan instabilitas politik atau lebih tepat dikatakan sebagai instabilitas pemerintahan. Dinamika ini dapat dilihat terutama dari segi jatuh bangunnya kabinet, karena mendapat mosi tidak percaya dari lawan politiknya mengingat jumlah suara partai politik di parlemen saat itu tidak ada yang mayoritas mutlak. Persaingan diantara partai-partai yang sangat tajam, bukan saja karena persaingan untuk merebut posisi-posisi strategis dalam kabinet, namun juga karena pertentangan ideologi (Hendri Supriyatmono, 1994:4). Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 saja terdapat 4 buah kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahun ada pergantian kabinet, bahkan ada kabinet yang berusia kurang dari satu tahun. Kabinet yang memerintah dalam waktu yang sangat singkat itu, tidak dapat melaksanakan programnya sampai selesai, sehingga tujuan yang diprogramkan tidak tercapai (Marwati Djoened, 1990:212-213). Hal inilah yang menyebabkan berkecamuknya instabilitas politik.

Tidak lama setelah pembentukan Negara Kesatuan RI diresmikan, Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. Dalam usahanya membentuk kabinet, M. Natsir ternyata mengalami kesulitan-kesulitan, terutama dengan PNI sebagai partai kedua yang mempunyai jumlah kursi terbanyak di parlemen, sehingga sampai dua kali formatur mengembalikan mandatnya. Akhirnya kabinet berhasil dibentuk setelah untuk ketiga kalinya M. Natsir ditunjuk lagi sebagai formatur kabinet dengan petunjuk Presiden Soekarno agar tidak terlalu terikat pada partai-partai.

Kabinet pertama dibawah UUDS 1950 adalah Kabinet Natsir yang dilantik tanggal 7 September 1950 dengan M. Natsir sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi antara partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Khatolik, Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan

Partai Kristen Indonesia (Parkindo). PNI tidak diikutsertakan, karena menolak duduk di dalam kabinet setelah tuntutannya tidak dipenuhi oleh formatur (Wilopo, 1978:20-21).

Kabinet Natsir juga merupakan *zaken kabinet*, yaitu menteri-menteri yang ada dalam parlemen dianggap ahli dalam bidangnya masing-masing. Program-program penting Kabinet Natsir adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat secepatnya, dan mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar dalam melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

Perundingan masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda menemui jalan buntu. Rupanya Belanda tidak bermaksud untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia (Marwati Djoened, 1990:213-214). Kegagalan Kabinet Natsir dalam menyelesaikan Irian Barat menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi Hadikusumo mengenai pencabutan PP No.39/1950 tentang pembentukan DPRS dan DPRDS, dianggap hanya menguntungkan partai tertentu saja. Mosi ini diterima oleh parlemen. Hal inilah yang menyebabkan menteri-menteri dari PIR, PSII, dan Fraksi Demokrat ditarik dari parlemen oleh pimpinan cewannya. Akhirnya M. Natsir menyerahkan mandatnya pada tanggal 21 Maret 1951 (Achmad Sanusi, 1958:58).

Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Mr. Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi PNI-Masyumi, sebab kedua partai ini merupakan partai yang terkuat dalam DPR. Usaha ini gagal, sehingga Mr. Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 18 April 1951. Pada hari itu juga Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru yaitu Sidik Djojokusarto (PNI) dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk membentuk kabinet koalisi atas dasar nasional yang luas. Kabinet baru dibawah pimpinan Dr. Soekiman Wirjosandjojo dan Soewirjo diumumkan pada tanggal 27 April 1951 (Marwati Djoened, 1990:214).

Program-program dari kabinet Soekiman adalah menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman; mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani; menyelesaikan persiapan pemilihan umum; menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia; serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya (Sekretariat Negara RI,1981:57-58).

Kabinet Soekiman juga tidak berusia lama. M. Natsir kehilangan dukungan dalam parlemen ketika ia mengambil tindakan penangkapan terhadap PKI. Hal pokok yang menyebabkan Kabinet Soekiman jatuh adalah dalam bidang politik luar negeri (Ulf Sundhaussen,1982:106). Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo secara diam-diam telah menandatangani suatu persetujuan bantuan ekonomi dan bantuan persenjataan dengan pemerintah Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act (MSA). Hal ini menimbulkan reaksi besar dari beberapa menteri dan dewan-dewan pimpinan partai pemerintah (Achmad Sanusi,1958:59). Persetujuan ini ditafsirkan bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat (AS), sehingga bertentangan dengan program kabinet, yaitu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif (Sekretariat Negara RI,1981:58). Soekiman akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden tanggal 23 Februari 1952. Dengan jatuhnya Kabinet Soekiman, Indonesia kembali mengalami krisis pemerintahan.

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk S.dik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Presiden mengharapkan bahwa kabinet yang dibentuk adalah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Usaha dari kedua formatur itu menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya, kemudian presiden menunjuk Wilopo (PNI) sebagai formatur baru (Marwati Djoened,1990:216). Akhirnya pada tanggal 4 April 1952, kabinet Wilopo mengumumkan susunan kabinetnya yang terdiri atas wakil-wakil dari PNI,

Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, Paimuda, Partai Buruh, dan PSII. Dalam menentukan susunan personalia kabinet, Wilopo mengusahakan adanya suatu team yang terpadu sebagai zaken kabinet rasional. Supaya pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan mantap tanpa dihambat karena timbulnya pertentangan intern (Wilopo,1978:27-28).

Program Kabinet Wilopo tidak banyak berboda dengan kabinet sebelumnya. Program-program penting Kabinet Wilopo yaitu melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah, meningkatkan kemakmuran rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman, melaksanakan perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya (Sekretariat Negara RI,1981:65).

Dalam masa 3 tahun sejak Negara Kesatuan RI terbentuk menggantikan RIS, kabinet sudah berganti 3 kali. Jadi satu kabinet hanya memerintah kira-kira satu tahun. Sudah tentu program kabinet yang direncanakan tidak bisa terlaksana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan pemerintahan.

2.2 Peristiwa 17 Oktober 1952

2.2.1 Latar Belakang

Peristiwa 17 Oktober 1952 dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yaitu rasionalisasi militer yang berupa rencana demobilisasi dari KSAD Kolonel A.H. Nasution, indisipliner seorang bawahan terhadap atasannya, yaitu Kolonel Bambang Soepeno yang tidak disiplin terhadap Kolonel A.H. Nasution, dan adanya campur tangan parlemen terhadap beleid KSAD Kolonel A.H. Nasution tentang rencana demobilisasi militer.

2.2.1.1 Rasionalisasi Militer

Program Kabinet Wilopo dalam bidang keamanan adalah menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman (Sekretariat Negara RI, 1981:65). Hubungan antara pimpinan tentara dan pemerintah (sipil) tampaknya akan menuju kerja sama yang harmonis. Namun, justru dalam masa jabatan Wilopo lah hubungan sipil dan militer mengalami krisis yang pertama di zaman merdeka (Ulf Sundhaussen, 1982:107). Hal ini berkaitan dengan rasionalisasi militer.

Rasionalisasi militer ini telah ada pada masa Kabinet Hatta. Salah satu program Kabinet Hatta adalah melakukan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Kebijakan ini dilakukan pada pertengahan Februari 1948 dengan jalan mengurangi jumlah anggota Angkatan Perang dari 350.000 orang menjadi 60.000 orang. Rasionalisasi sebagai realisasi dari UU No. 3/1948, Undang-undang Rasionalisasi Militer (M. Rusli Karim, 1989:26). Program tersebut sampai saat itu mencapai hasil yang cukup besar berkat adanya kerja sama serta pelaksanaan dan pimpinan yang kuat dari Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Kolonel T.B. Simatupang, KSAD Kolonel A.H. Nasution dan Sekretaris Jendral Kemiliteran Mr. Ali Budiardjo (Yahya A. Muhaimin, 1982:26).

Pemerintah kabinet Wilopo pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, seperti karet, tinah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat. Mengingat bahwa penerimaan negara akan mengalami penurunan, maka adanya defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diadakan penghentian-penghentian yang drasis. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sebesar 20% yang telah diputuskan mulai dilaksanakan tanggal 1 Mei 1952 tetap dilaksanakan, tetapi pembagian jatah beras pada pegawai terpaksa dihentikan, sedangkan hadiah lebaran tidak pula dapat diberikan (Wilopo, 1958:29).

Kesulitan bertambah setelah hasil panen menurun, sehingga harus disediakan jumlah devisa yang lebih besar lagi untuk mengimpor beras. Dalam usaha meningkatkan ekspor untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor. Selain itu dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang non-esensial dan mewajibkan para importir membayar uang muka sebesar 40% (Marwati Djoered, 1990:217).

Selaras dengan kondisi negara, Menteri Keuangan Dr. Soemtro Djojohadikusumo melakukan penghematan Anggaran Belanja Negara dalam segala bidang termasuk bidang kemiliteran. Ini berarti dilakukannya rasionalisasi dalam tubuh Angkatan Perang yang pelaksanaannya dilakukan di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX.

Sedangkan sebagai pihak pelaksana operasionalnya dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.F. Nasution melalui rencana demobilisasi dalam tubuh militer. Tindakan ini dilakukan oleh KSAD dengan tujuan untuk meningkatkan mutu profesionalisme militer (Saleh As'ad Djamhari, 1971:77), dengan mengubah tentara yang ada menjadi tentara inti yang sangat terlatih, sehingga memiliki mutu teknis militer yang lebih tinggi.

Terbatasnya alokasi anggaran belanja untuk membeli alat perlengkapan militer serta untuk biaya operasi-operasi, maka pada pertengahan tahun 1952, pimpinan TNI AD memutuskan untuk mulai melaksanakan demobilisasi sebagai konsekwensi reorganisasi dan rasionalisasi militer tersebut. Demobilisasi itu akan dilakukan secara berangsur-angsur, sehingga pada akhir tahun 1953 tentara yang didemobilisasi mencapai 80.000 orang tentara dari 200.000 orang tentara. 40.000 orang akan dipensiunkan dan 40.000 orang lainnya adalah mereka yang dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi tentara, baik karena fisiknya maupun kesehatannya.

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang militer mendapat reaksi di kalangan TNI sendiri. Ada dua kelompok, yakni kelompok yang menghendaki profesionalisme

dan kelompok yang menentang profesionalisme. Mereka yang tidak menyetujui rencana KSAD mengenai demobilisasi terutama anggota-anggota tentara eks PETA dan Laskar yang dipelopori oleh Kolonel Bambang Soepeno. Mereka takut kehilangan kedudukannya apabila demobilisasi dilakukan secara menyeluruh, mengingat sebagian besar kelompoknya terdiri dari orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah. Reaksi menentang demobilisasi itu mendapat dukungan politik yang cukup besar dari PNI dan terutama dari presiden Soekarno. Karena hal inilah, maka konflik intern dalam tubuh AD tersebut terproyeksi menjadi "*Political Community*" (Yahya A. Muhaimin, 1982:70).

2.2.1.2 Indisipliner Seorang Bawahan Terhadap Atasan

Kolonel Bambang Soepeno yang menjabat Komandan Candradimuka, lembaga pendidikan mental bagi perwira di Bandung yang telah ditutup oleh KSAD Kolonel Nasution (Amrin Imran, 1971:94), sekitar awal Juli 1952 mengadakan pembicaraan dengan para Panglima TT untuk menandatangani pernyataan bersama agar jabatan KSAD Kolonel Nasution diganti. Akan tetapi para Panglima TT itu menolak dan tidak menyetujui cara yang akan mengakibatkan perpecahan di kalangan Angkatan Darat (AD) sendiri. Dengan kegagalan itu, kemucian Kolonel Bambang Soepeno langsung menghadap presiden/Panglima Tertinggi, agar meninjau kembali kebijaksanaan pimpinan AD, berhubung banyak perwira AD yang merasa kurang puas.

Kepergian Kolonel Bambang Soepeno menghadap presiden mendapat tanggapan yang cukup serius di kalangan pimpinan AD. Maka pada tanggal 12 Juli 1952 diadakanlah rapat oleh para perwira AD di kediaman KSAD Mayor Jendral T.B. Simatupang (Dinas Sejarah TNI AD, 1979:555-576). Dalam rapat itu Kolonel Bambang Soepeno mengemukakan keberatannya terhadap beleid pimpinan AD dan ia menyatakan telah membicarakan hal ini dengan parlemen, karena dianggap sebagai organ tertinggi dan diharapkan dapat memecahkan persoalannya.

Tanggal 13 Juli 1952, Kolonel Bambang Soepeno mengirimkan surat yang ditujukan kepada presiden, Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI), parlemen dan semua pejabat teras AD. Isi pokok surat itu adalah tidak adanya lagi kepercayaan kepada pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat, mengenai kebijaksanaan pimpinan AD dalam rangka pertahanan negara. Hal ini menunjukkan tidak disiplinnya seorang bawahan terhadap atasannya. Ia juga menyatakan keberatan pemakaian *Nederlandsche Militaire Missie* (NNM) dalam pembinaan pendidikan perwira. Selanjutnya dinyatakan agar pimpinan AD diganti (A.H. Nasution, 1983:19-27).

Atas isi surat Kolonel Bambang Soepeno tersebut, KSAD Kolonel Nasution telah memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap kritik dan belcidnya serta mengenai pembatasan Kolonel Bambang Soepeno untuk sementara dari dinas ketentaraan. Atas keputusan itu, ia menolak dengan alasan bahwa tindakan menghadap langsung kepada presiden sebagai akibat permintaan penyelesaian dari pemerintah mengenai kebijaksanaan pimpinan AD. Alasan ini diutarakan dalam suratnya tanggal 18 Juli 1952 (Dinas Sejarah TNI AD, 1979:577).

2.2.1.3 Campur Tangan Parlemen Dalam Tubuh Militer

Persoalan Kolonel Bambang Soepeno telah menjadi perhatian parlemen. Tanggal 28 Juli 1952 DPRS mulai mengadakan serangkaian sidang membicarakan masalah yang timbul sehubungan dengan adanya surat Kolonel Bambang Soepeno. Selama sepuluh minggu setelah diadakan 4 sidang tertutup dan 17 sidang terbuka. Dalam sidang-sidang itu, kebijaksanaan menteri pertahanan dan pimpinan TNI AD dikecam dan dituduh bahwa TNI AD didominasi oleh PSI, bahkan program reorganisasi dituduhkan sebagai usaha untuk memperkuat posisi PSI dalam tubuh TNI AD untuk kemudian melancarkan *coup d'etat*. Terjadi perdebatan sengit dalam sidang. Disinilah mulai tumbuh bibit ketegangan antara parlemen dengan TNI AD (Amrin Imran, 1971:95)

Sementara itu diluar TNI AD dua orang anggota parlemen, yaitu Debasa Daeng Lalo dan Rondonuwu mengirim surat kepada pemerintah yang menela kebijaksanaan Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Tentara dan Territorium VII/Wirabuana dalam melaksanakan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. Surat itu menimbulkan kegemparan dikalangan anggota parlemen. Kolonel Gatot Soebroto sendiri mengatakan bahwa laporan kedua anggota parlemen tersebut tidak berdasarkan kenyataan (Saleh As 'ad Djambhari,1979:80).

Persoalan yang tadinya merupakan masalah intern TNI AD kini telah menjadi *political issue*. Issue ini mencapai puncaknya setelah adanya serangkaian mosi tidak percaya di parlemen (Yahya A. Muhaimin,1982:71).

Pada tanggal 23 September 1952 Zainal Baharuddin mengajukan mosinya, menyatakan tidak percaya atas kebijaksanaan menteri pertahanan dalam menyelesaikan pertikaian yang ada dalam Angkatan Perang, meminta agar diadakan reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, dan menuntut segera diadakan UU Pertahanan Negara agar segala peraturan mengenai Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang dilakukan dengan UU (A.H. Nasution,1983:84-90). Mosi ini didukung oleh Partai Murba, Partai Buruh dan Partai Rakyat Nasional (PRN) (Payung Bangun,1996:166).

IJ Kasimo dari Partai Katolik mengajukan mosinya pada tanggal 13 Oktober 1953, menyatakan agar pemerintah membentuk sebuah panitia negara yang terdiri atas anggota-anggota parlemen yang diangkat oleh presiden dan bertugas mempelajari secara obyektif seluruh persoalan di dalam parlemen dan kemudian dalam waktu tiga bulan memberi saran untuk penyempurnaan struktur kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Mosi ini didukung oleh Partai Masyumi, Partai Buruh, Parkindo dan Parindra (Yahya A. Muhaimin,1982:72).

Tanggal 14 Oktober 1952 masuklah mosi Manai Sophiaan, yang mendesak supaya membentuk panitia negara yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR yang diangkat oleh presiden. Anggota DPR itu bertugas menampung dan mempelajari persoalan yang timbul dalam perdebatan-perdebatan di parlemen

dalam rangka perbaikan struktur Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, mempercepat adanya UU Pertahanan Negara, dan selekasnya mengakhiri bantuan NMM. Mosi ini didukung oleh PNI, NU dan PSII.

Setelah diajukanya ketiga mosi itu, maka pada tanggal 16 Oktober 1952, parlemen mengadakan sidang untuk mengambil keputusan atas mosi-mosi itu melalui pemungutan suara/voting. Mosi Zainal Baharuddin ditolak dengan 39 suara setuju dan 80 suara tidak setuju. Voting untuk Manai Sophiaan dengan hasil 91 suara setuju dan 54 suara tidak setuju. Sedangkan mosi Kasimo sudah dicabut sebelumnya, karena mosi Kasimo dan mosi Manai Sophiaan tidak berbeda, jadi digabung (A.H. Nasution, 1983:119-131).

Seama sidang-sidang parlemen itu, perhatian masyarakat terus meningkat. Koran-koran ibukota dan propinsi/daerah setiap hari memberitakan mosi Baharuddin dan Manai Sophiaan serta memberi komentar melalui kacamata masing-masing.

Perdebatan masalah intern TNI AD diparlemen, menyebabkan ketegangan memuncak. Terlebih setelah parlemen menerima mosi Manai Sophiaan. Para Panglima TNI AD menganggap bahwa parlemen telah melakukan intervensi politik kedalam tubuh TNI AD (Saleh As'ad Djamhari, 1971:80). Kondisi yang cukup kompleks mulai dari jatuh banggunya kabinet hingga campur tangan parlemen dalam masalah intern TNI AD dengan memperdebatkan kebijaksanaan pimpinan TNI AD tentang rasionalisasi militer pada akhirnya memicu meletusnya Peristiwa 17 Oktober 1952.

2.2.2 Tujuan/Sasaran

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah suatu demonstrasi rakyat di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen karena terlalu jauh mencampuri urusan intern TNI AD dan menuntut segera diadakannya pemilihan umum.

Sasaran dari demonstrasi massa ini adalah pemerintah yang berkuasa saat itu. Para demonstran menyampaikan tuntutan mereka kepada presiden Soekarno sebagai kepala negara untuk membubarkan parlemen yang kurang representatif dan karena

parlemen terlalu mencampuri urusan intern TNI AD, dan agar segera melaksanakan pemilihan umum. Pernyataan ini disampaikan oleh lima orang delegasi yang mewakili demonstran. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Presiden Sukarno. Delegasi itu juga menyatakan bahwa demonstrasi ini hanya bertujuan untuk mendemokratisir pemerintah. Disamping itu para demonstran mengharapkan segera disusunnya UU dan terbentuknya parlemen yang baru. Mereka menyatakan bahwa demonstrasi itu tidak ada hubungannya dengan salah satu partai politik (Yahya A. Muhaimin, 1982:84).

Dalam jawabannya di depan demonstran, presiden menolak untuk membubarkan parlemen, karena meskipun menurut Undang-Undang Dasar 1950 presiden dapat membubarkan parlemen, namun pembubaran itu perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota-anggota parlemen (Daniel Dhakidae dalam Amien Rais, 1986:182). Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa tidak mungkin secepatnya melaksanakan pemilu karena pemilu itu sendiri memerlukan persiapan-persiapan. Disamping itu apabila presiden membubarkan parlemen berarti presiden menjadi diktator (Yahya A. Muhaimin, 1982:173).

Demonstrasi pada tanggal 17 Oktober 1952 tersebut bukanlah merupakan suatu kudeta AD terhadap pemerintah. Tuduhan kudeta ini dilontarkan oleh Ir. Sakirman (PKI) dan Arudji Kartowinoto (PSII) terhadap Kolonel Nasution, menyatakan bahwa Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan suatu percobaan kudeta (A.H. Nasution, 1983:169). Juga ada tuduhan dari Presiden Soekarno bahwa AD akan menjadikannya diktator. Tuduhan presiden itu berdasarkan tersebarnya dokumen utama Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Namun dalam tanggapannya Kolonel Nasution mengatakan bahwa dokumen itu palsu belaka (Daniel Dhakidae dalam Amien Rais, 1986:180).

Dalam sanggahannya itu Kolonel Nasution mengatakan bahwa tidak pernah diputuskan oleh KSAD atau rapat KSAD dan apra prajurit untuk melakukan kudeta, dalam arti memaksa presiden dengan kekerasan. Hal yang benar adalah dengan tekanan-tekanan baik dalam argumentasi maupun dengan mengajak kelompok-

kelompok masyarakat yang setuju untuk menyatakan dukungannya (A.H. Nasution, 1983:170).

Cara para demonstran menyampaikan pernyataannya, bagaimanapun tidak dapat dianggap sebagai intimidasi. Dikui memang ada demonstran yang mendukung pernyataan tentara, tetapi tidak ada yang memperlihatkan sikap permusuhan dengan presiden. Selain itu juga tidak ada rencana untuk bertindak lebih jauh daripada hanya menyampaikan pernyataan kepada presiden. Kolonel Nasution dapat melihat lebih jelas dimensi-dimensi politik dari perebutan kekuasaan antara kabinet dan pengancam-pengancam, tidak ingin melibatkan tentara lebih jauh di dalam konflik dengan menggunakan ancaman kekerasan (Ulf Sundhuussen, 1982:129).

Jadi sasaran dan tujuan dari Peristiwa 17 Oktober 1952 yang berupa demonstrasi massa di Jakarta adalah pemerintah yang berkuasa pada saat itu dan demonstrasi massa itu bertujuan hanya untuk mendemokratisir pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan pengertian metode penelitian, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian metode dengan tujuan untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah kerja dalam penelitian.

Secara etimologis, metode berasal dari kata bahasa Yunani yaitu 'methodos' yang berarti cara atau jalan (Koertjraningrat,1981:71). Menurut kamus Webster's Third New International Dictionary of The English Language , yang dimaksud dengan metode ialah suatu prosedur atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis, yang dipakai oleh suatu disiplin ilmu tertentu (Helius Syamsudin,1996:1). Sedangkan Mohammad Ali berpendapat, bahwa metode ialah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan (1985:21)

Penelitian merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris 'research' yang berasal dari kata 're' yang berarti kembali dan 'to search' yang berarti mencari. Arti sebenarnya dari research atau di Indonesiakan menjadi riset ialah mencari kembali (Moh. Nazir,1988;13). Menurut Syaifudin Anwar, penelitian atau research merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan (1998:1). Sementara Consuelo G. Sevilla berpendapat, bahwa penelitian berarti pencarian teori, pengujian teori dan pemecahan masalah (1993:2). Hal ini berarti masalah itu telah ada dan diketahui. Pemecahan masalah harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan logis.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau pemecahan masalah yang dihadapi (Moh. Ali,1985:21). Mohammad Nazir berpendapat, bahwa metode penelitian merupakan pemandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan serta alat-alat apa yang digunakan (1985:51). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang

peneliti dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan hati-hati dan sempurna guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah.

Menurut Consuelo G. Sevilla ada lima metode penelitian, yaitu metode penelitian sejarah (metode penelitian historis), metode penelitian deskriptif, metode penelitian eksperimen, metode penelitian kausal komparatif (*ex post facto*) dan metode penelitian partisipatori (1993:40). Berdasarkan lima jenis penelitian di atas, untuk penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pertama, yaitu metode penelitian historis atau metode penelitian sejarah. Adapun pengertian dan langkah-langkah metode penelitian sejarah akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau metode penelitian historis. Hal ini disebabkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh serta langkah-langkah yang dilakukan lebih mengarah pada jenis penelitian sejarah.

Sebelum menguraikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian metode penelitian sejarah. Nugroho Notokusanto memberikan pengertian metode penelitian sejarah sebagai suatu prosedur kerja sejarawan untuk melukiskan kisah masa lampau berdasarkan jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini digunakan sebagai prosedur kerja sejak penulisan sejarah dilakukan secara ilmiah (1984:17). Pengertian metode penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (1975:32). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian sejarah adalah sarana atau alat bantu yang digunakan oleh sejarawan dalam suatu prosedur kerja untuk menguji dan menganalisis secara kritis bahan-bahan atau jejak-jejak yang ditinggalkan di masa lampau.

Menurut Nugroho Notosusanto pelaksanaan metode penelitian sejarah dibagi menjadi empat langkah yaitu : (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi dan, (4) Historiografi (1971:17).

3.2.1 Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik artinya mencari atau menemukan jejak masa lampau atau jejak sejarah. Heuristik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu 'heurisken' artinya 'to find' atau mencari dahulu baru menemukan. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber sebagai bahan penulisan sejarah (Nugroho Notosusanto,1971:17). Sumber sejarah menurut Louis Gottschalk adalah sesuatu yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan atau penceritaan kembali peristiwa masa lampau (1975:45). Mengumpulkan data adalah pekerjaan awal paling baik untuk memecahkan masalah (Consuelo G. Sevilla,1993:49). Sumber-sumber sejarah merupakan bahan mentah sejarah yang mencakup segala macam evidensi/bukti yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktifitasnya di masa lalu, yang berupa tulisan dan lisan (Helius Syamsudin,1996:73).

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian bibliografis, maka sumber yang digunakan adalah sumber tertulis, seperti buku-buku dan lain sebagainya dan dilakukan di perpustakaan (bibliothek). Buku-buku tersebut memuat pendapat para ahli tentang peristiwa sejarah yang diteliti.

Dalam ilmu sejarah sumber tertulis dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber informasi yang diperoleh dari orang yang menyaksikan secara langsung atau orang yang terlibat secara langsung dalam suatu peristiwa sejarah. Sumber primer dianggap sebagai sumber terbaik. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber informasi yang diberikan oleh orang yang secara tidak langsung menyaksikan, atau orang yang tidak terlibat langsung dalam kejadian atau peristiwa. Informasi tersebut diperoleh dari orang lain atau dikisahkan oleh orang lain (Consuelo G. Sevilla,1993:49). Dari kedua macam

sumber tersebut semuanya dipakai dalam penelitian ini. Sumber primer mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada sumber sekunder, karena sumber primer adalah sumber asli yang diperoleh dari saksi mata yang mengalami peristiwa itu atau saksi hidup pada saat peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder juga dipakai karena sumber primernya sulit didapatkan dan juga berfungsi memberikan informasi dan data yang telah disalin dari sumber aslinya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang ditulis oleh orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa, seperti A.H. Nasution dalam bukunya *Memenuhi Panggilan Tugas*, sedangkan sumber sekunder yang digunakan seperti Yahya A. Muhaimin dalam bukunya *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 – 1965*.

Di dalam tulisan ini, sumber yang dipakai juga dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok maksudnya ialah sumber yang paling banyak diambil sebagai bahan penulisan, dapat juga disebut sebagai sumber utama. Sedangkan sumber penunjang ialah sumber yang berfungsi sebagai pelengkap bagi sumber pokok. Gunanya untuk lebih meyakinkan validitas data-data yang diperoleh dari sumber pokok, atau juga untuk melengkapi data yang di sumber pokoknya kurang begitu jelas atau tidak ada.

3.2.2 Kritik

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik. Kritik adalah menyeleksi atau menilai sumber-sumber atau data-data sejarah menjadi fakta sejarah/historical fact (Nugroho Notosusanto, 1971:17). Sejarahwan tidak akan menerima begitu saja apa yang tertulis dan tercantum dalam sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Sumber-sumber tersebut harus disaring atau diseleksi secara kritis (Helius Syamsudin, 1996:103). Kritik Sejarah dimaksudkan untuk mencari kebenaran, sehingga didapatkan sumber-sumber sejarah yang valid dan reliabel, karena sumber-sumber tersebut masih berupa bahan-bahan mentah (Nugroho Notosusanto, 1984:134-135). Kritik sejarah dapat digunakan untuk mengadakan analisis terhadap sumber,

apakah sumber itu dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak, dapat dipercaya atau tidak.

Kritik sejarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik Ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari segi sejarah (Helius Syamsudin, 1996:194). Kritik ekstern terutama harus menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu : (1) apakah sumber itu adalah sumber yang kita kehendaki, (2) apakah sumber itu asli atau tiruan, (3) apakah sumber itu utuh atau sudah berubah-ubah (Nugroho Notosusanto, 1971:20-21). Pengujian kritik eksternal dilakukan dua cara yaitu : (1) menentukan pengarang dan penulis, (2) menentukan tempat dan tanggal bahan sumber yang diterbitkan (Consuelo G. Sevilla, 1996:55).

Kritik internal terhadap sumber sejarah adalah menyelidiki isi dari bahan sejarah dan dokumen sejarah. Kritik internal menyelidiki apakah pernyataan yang dibuat benar-benar merupakan fakta historis dan apakah isinya cocok dengan kejadian sejarah yang sebenarnya. Kritik internal termasuk isi, bahasa yang digunakan, tata bahasa, situasi pada saat penulisan (M. Nazir, 1988:60). Kritik intern dilakukan setelah kritik ekstern, untuk membuktikan ketepatan isi sumber yang diperlukan. Bagi peneliti yang menggunakan metode penelitian sejarah, kedua kritik tersebut digunakan dalam menentukan validitas sumber. Kritik ekstern dan kritik intern umumnya dikerjakan secara silih berganti oleh peneliti-peneliti sejarah.

3.2.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya dari penulisan sejarah adalah interpretasi. Nugroho Notosusanto memberikan pengertian interpretasi, adalah kegiatan mengadakan penafsiran terhadap fakta-fakta dari hasil pengolahan data. Dari berbagai fakta-fakta itu harus dirangkai dan dihubung-hubungkan, sehingga menjadi satu-kesatuan yang kronologis (1971:23), sehingga satu fakta dengan fakta lainnya terlihat sebagai satu rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan sebagai suatu rangkaian bermakna dari kehidupan masa lampau suatu masyarakat atau suatu bangsa

(I.G.Widja,1988:23). Kesemuanya itu untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam memahami kenyataan-kenyataan sejarah.

Menurut Louis Gottschalk, sebagaimana yang dikutip oleh Nugroho Notosusanto, dijelaskan bahwa fakta sejarah atau historical fact adalah fakta-fakta yang secara langsung maupun tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan fakta-fakta tersebut dipercaya karena sudah diuji sesuai dengan norma-norma dari metode sejarah (1971:27). Berbagai fakta sejarah tadi masih terpisah-pisah, oleh karena itu diperlukan interpretasi agar nantinya tersusun kisah sejarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho Notosusanto yang menyatakan bahwa fakta sejarah itu mempunyai dua komponen yang saling berkaitan, yaitu fakta dan interpretasi (1984:22).

3.2.4 Historiografi

Langkah terakhir dari penelitian sejarah ialah historiografi. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan titik puncak dari seluruh kegiatan penelitian sejarah. Dalam metodologi sejarah, historiografi merupakan bagian terakhir (Poespoprodjo,1987:21). Historiografi menurut Nugroho Notosusanto adalah penyampaian hasil-hasil interpretasi dari analisis terhadap fakta-fakta sejarah ke dalam bentuk cerita atau kisah sejarah secara tertulis. Historiografi merupakan bagian kegiatan dari metode sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis dari suatu kisah yang selaras (1984:42).

Metode yang digunakan dalam historiografi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta sebagaimana adanya, dengan penekanan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi,1991:63). Historiografi disusun berdasarkan fakta-fakta yang penulis yakini kebenarannya, kemudian penulis menyusun secara kronologis, sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

Dalam historiografi ini dituntut kemampuan dan keterampilan menulis dan daya imajinatif penulis untuk melukiskan peristiwa sejarah secara kronologis sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam peristiwa itu, harus mampu menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya secara harmonis, sehingga nantinya akan terwujud kisah sejarah yang ilmiah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian sejarah menurut jenisnya dibagi menjadi empat macam yaitu : (1) penelitian sejarah komparatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian biografis dan, (4) penelitian bibliografis atau kepustakaan (M. Nazir, 1985:61-62). Dalam penelitian ini digunakan penelitian bibliografis atau penelitian kepustakaan. Kerja penelitian ini menghimpun karya-karya dari seorang penulis atau filosof. Sedangkan tempat penelitian adalah di perpustakaan-perpustakaan. Untuk menentukan tempat penelitian atau perpustakaan mana yang digunakan dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling. Menurut Mohammad Ali purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel (dalam hal ini perpustakaan) berdasarkan pada suatu pertimbangan yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya oleh peneliti atau penulis (1987:65).

Berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah diketahui oleh penulis, maka perpustakaan yang dipilih atau digunakan dalam penelitian ini adalah perpustakaan Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember. Penulis telah mengenal dan mengetahui bahwa perpustakaan Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember memiliki buku-buku sumber yang diperlukan penulis. Selain itu ada beberapa perpustakaan pula yang digunakan. Perpustakaan itu adalah UPT perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Universitas Negeri Malang, dan perpustakaan Museum Brawijaya di Malang. Di samping itu penulis menggunakan buku-buku koleksi sendiri.

Dilihat dari segi bahasa, kata purposive sampling berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu purposive berarti sengaja; sampling berasal dari kata sample yang

berarti contoh, artinya sebagian dari populasi. Populasi berarti jumlah dari seluruhnya. Keseluruhan dari populasi perpustakaan di Jawa Timur adalah lebih dari yang telah penulis sebutkan di atas. Namun penulis memang sengaja hanya menentukan perpustakaan tersebut di atas, sebab dengan itu telah penulis anggap mencukupi keperluan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan langkah pertama dalam metode sejarah yaitu heuristik, maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan sumber tertulis atau dokumen-dokumen tertulis, yang dimaksud tidak hanya berupa buku-buku tetapi juga bahan-bahan tertulis lainnya seperti surat kabar, majalah, cutaan atau buku harian dan sebagainya. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode untuk mencari sumber yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, dan majalah (Moh. Ali, 1982:67). Dalam pengumpulan data ini penulis lebih banyak mencari sumber data yang berupa buku, surat kabar dan majalah.

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang bersifat sekunder, yaitu informasi atau data yang telah disalin dari sumber aslinya, dan yang kedua adalah sumber primer, seperti buku-buku karangan A.H. Nasution. Sumber-sumber yang penulis gunakan dapat juga penulis kelompokkan menjadi dua, yaitu sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang paling banyak dipakai atau menjadi acuan dalam penulisan ini, sedangkan sumber penunjang adalah sumber pelengkap yang memberi tambahan yang menunjang sumber pokok. Di daftar kepustakaan, sumber pokok penulis beri kode *) dibelakangnya.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data maka langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah mengadakan analisis dengan menilai atau menguji sumber data dengan kritik, yang dilanjutkan dengan langkah interpretasi. Analisis data dilanjutkan dengan

kegiatan merangkaikan fakta yang satu dengan fakta yang lain yang berhubungan logis, kronologis sehingga tersusun suatu kisah sejarah yang sistematis, obyektif, dan rasional.

Dalam penelitian sejarah langkah analisis data digunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif. Metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui pemikiran yang mendalam dan mendasar dengan menggunakan pola berpikir induktif dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir logika (Hadari Nawawi, 1983:62).

3.5.1 Teknik Logika Komparatif

Teknik logika komparatif adalah pemecahan masalah dengan cara membanding-bandingkan data yang ada. Menurut Moh. Ali teknik logika komparatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena/data untuk mencari faktor atau situasi yang menyebabkan timbulnya/akibat peristiwa tertentu (1982:123). Sedangkan Winarno Surakmad berpendapat, bahwa logika komparatif adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu fenomena data sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan (1990:136). Teknik logika komparatif digunakan untuk membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan fakta sejarah yang benar, yang bisa dirangkaikan menjadi kisah sejarah.

Jadi teknik logika komparatif adalah cara mencari faktor-faktor penyebab timbulnya/akibat suatu peristiwa tertentu dengan cara membanding-bandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai data yang diperoleh.

3.5.2 Teknik Logika Induktif

Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan teknik logika induktif. Teknik logika induktif adalah cara berpikir yang berlandaskan pada pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang unik, dan merangkaikan fakta-fakta yang khusus menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1994:2). Mohammad Ali

berpendapat bahwa teknik logika induktif adalah proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjak dari hal-hal yang khusus ke umum (1987:18).

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa teknik logika induktif adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan, tinjauan kepustakaan, dan pembahasan di BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. latar belakang Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah situasi politik saat itu dengan adanya pergantian kabinet dalam waktu yang sangat singkat dan rasionalisasi militer sebagai usaha untuk mengadakan penghematan anggaran belanja negara,
2. proses terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah demonstrasi rakyat di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen karena terlalu jauh mencampuri urusan intern TNI AD, dan segera diadakan pemilihan umum,
3. dampak Peristiwa 17 Oktober menyebabkan perpecahan dalam tubuh AD menjadi dua kelompok yaitu kelompok "pro Peristiwa 17 Oktober" dan kelompok "anti Peristiwa 17 Oktober".

5.2 Saran

Beritik tolak pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran yaitu :

1. bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya banyak membaca literatur tentang Sejarah Nasional Indonesia Modern, sehingga dapat menambah dan memperluas pengetahuan,
2. bagi generasi penerus perjuangan bangsa, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar peristiwa yang merugikan bangsa dan negara itu tidak terulang lagi,
3. bagi pembaca pada umumnya, hendaknya mengetahui segi positif dan negatif agar Peristiwa 17 Oktober dijadikan pelajaran di masa yang akan datang,
4. bagi almamater, hendaknya menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 untuk memperkaya kepustakaan di UPT Universitas Jember.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Syukur, 1998, *Peran ABRI di Masa Depan, dalam SENI*, No.10 Tahun VII, Jakarta.
- A.H. Nasution, 1983, *Memenuhi Panggilan Tugas, Musu Pancuroba Pertama*, Gunung Agung, Jakarta. *)
- Achmad Sanusi, 1958, *Perkembangan Sistem Pemerintahan RI 1945 - 1950*, FKIP Universitas Padjajaran, Bandung. *)
- Amrin Imran, Hayun Ugaya, Sri Suko, 1971, *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat, Jilid II*, Pusat Sejarah ABRI - Dephankam, Jakarta. *)
- Daniel Dhakidae, 1986, *Pemilihan Umum di Indonesia, dalam Amien Rais (Ed), Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta. *)
- Dinas Sejarah Militer TNI -AD, 1979, *Sejarah TNI-AD 1945 - 1973*, Dinas Sejarah Militer TNI-AD, Jakarta. *)
- Feith, Herbert, 1995, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 - 1965*, LP3ES, Jakarta.
- Gottschalk, L, 1975, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Susanto, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 199., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjan Madu University Press, Yogyakarta.
- Hendri Supriyatmono, 1994, *Nasution, Dwi Fungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah Reformasi Politik*, Sebelas Maret University Press, Surakarta. *)
- I Gde. Widja, 1988, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Melton Putra, Jakarta.
- Ismail Suny, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Joeniarto, 1990, *Sejarah Ketatanegaraan RI*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, Fuad Hasan, 1977, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat (Red), Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Mabes ABRI, 1990, *Sejarah Perkembangan ABRI 1945 - 1965*, Mabes ABRI, Jakarta.

- Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1990, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta. *)
- Mohammad Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung.
- Mohammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Rusli Karim, 1981, *Peranan ABRI dalam Politik*, Haji Masagung, Jakarta.
- , 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Panjang Surat*, Rajawali, Jakarta.
- Nodlinger Eric A, 1994, *Militer Dalam Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Pendidikan Sejarah*, Pusat Sejarah ABRI – Dephankam, Jakarta.
- , 1984, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Suatu Pengalaman*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Payung Bangun, 1996, *Kolonel Maudin Simbolon Liku-liku Perjuangannya dalam Membangun Bangsa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. *)
- Pour, Julius, 1997, *Renungan dan Catatan Mayjend TNI (Purn) Soehyaktio*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Roel Sanre, 1984, "Iwa Kusumasumantri : Upaya Menertibkan Tentara", dalam *Prisma*, Mei IX (No. 5), Jakarta : 25.
- Rusadi Kantaprawira, 1980, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Bandung.
- Saifudin Anwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saleh As'ad Djamhari, 1979, *Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945 - Sekarang)*, Dephankam ABRI, Jakarta. *)
- Sekretariat Negara RI, 1981, *30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid II*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta. *)
- Sevilla, Consuello G, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soebijono, 1992, *Perkembangan Fungsi ABRI sebagai Kekuatan Sosial Politik, dalam Soebijono (Ed), Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. *)
- Sundhaussen, Ulf, 1982, *Politik Militer Indonesia Menuju Dwi Fungsi ABRI 1945 - 1967*, LP3ES, Jakarta. *)
- Sutrisno Hadi, 1994, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Jakarta.
- W. Poespoprodjo, 1987, *Subjektivitas dalam Historiografi*, Remaja Karya, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta.
- Wilopo, 1978, *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Metodologi Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Yahya A. Muhaimin, 1982, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 - 1966*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. *)

*) : Buku Pokok

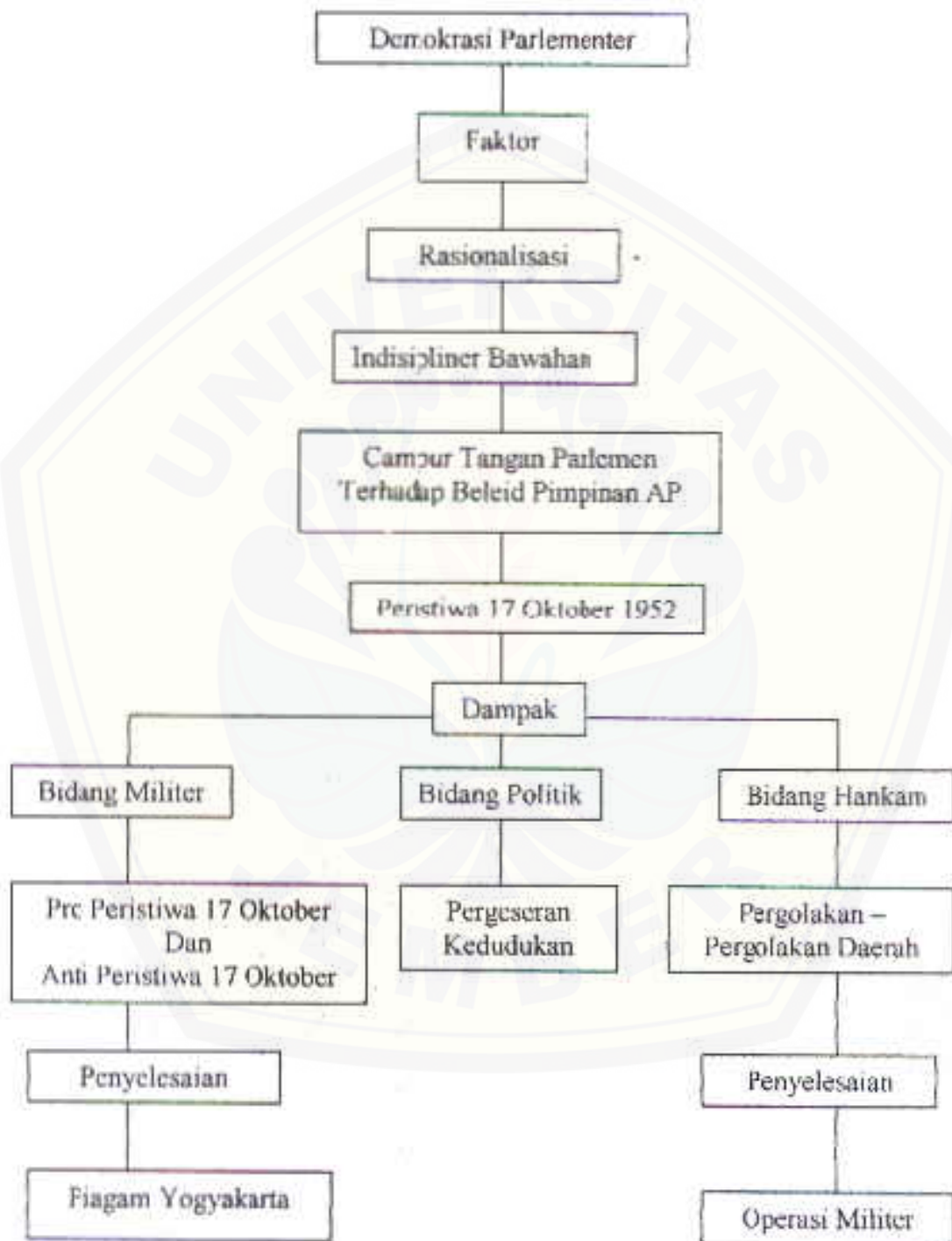
Lampiran 1

MATRIN PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN Sifat PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
1 Peristiwa 17 Oktober 1952	2 Studi tentang Peristiwa 17 Oktober 1952	3 a. Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah b. Sifat Penelitian : Penelitian Kepustakaan	4 Bagaimana proses terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 ?	5 a. Buku Pukul 13 buah b. Buku Penunjang : 25 buah	6 a. Penentuan Tempat Penelitian : Purposive Sampling b. Pengumpulan Data : Metode Dokumenter c. Analisis Data : Metode Filosofik dengan teknik: c.1 Logika Komparatif c.2 Logika Induktif

Lampiran 2 :

SKEMA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952




UPT PERPUSTAKAAN

 Alamat : Jl. Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto
 Kotak Pos 198 - Telp: (0331) 338261, 333820, atau 330224 Fax 307-505
 Fax: (0331) 338261, E-mail : lib@unjember.wisnolama.ac.id
 Jember 68121

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 174 / JKS. S. I / TU 4 ' 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dwiana Destim Dilia Kusumawati

NIM : BIE195210

Jur/Program : Pend. IPS/Pend. Sejarah

Fakultas : KIP

Angkatan : 1995

Tertimbang mulai bulan **September** sampai bulan **Juni** telah melaksanakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan judul sebagai berikut : **Studi Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952**

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Skripsi
23-10-1999	v	-	-	v
9-11-1999	v	v	-	v
13-11-1999	-	-	v	v
24-11-1999	v	-	-	v
2-12-1999	-	v	-	v
11-12-1999	-	v	-	v
24-12-1999	v	v	v	v
3-01-2000	v	v	-	-
10-02-2000	v	v	v	v
13-03-2000	v	v	-	v
22-05-2000	v	-	-	-
6-06-2000	v	v	v	v

Ditukiskan surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 9 Juni 200

 A.n. Kepala
 Kasubag TU

 Dra. Hj. Budiyanti, S.Sos
 NIP. 130 683 181

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : DWIYANA DESTIM DILLA KUSUMAWATI
 Nim / Jurusan / Angkatan : BIE 195 210 / PEND. SB2ARAH / 1995
 Judul Skripsi : Studi tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Pembimbing I : Drs. H. Chernoel Harti
 Pembimbing II : _____

KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Tg. Pembimbing
1.	Kamis, 11 September 99	Judul	
2.	Kamis, 18 September 99	Matrik dan rencana draft isi	
3.	Selasa, 4 Desember 99	Bab I	
4.	Kamis, 24 Februari 2000	Bab II	
5.	Senin, 6 Maret 2000	Bab III	
6.	Sabtu, 8 April 2000	Revisi Bab I, II, III	
7.	Jumat, 9 Juni 2000	Bab IV, V	
8.	Kamis, 6 Juli 2000	BAB I, II, III, IV dan V	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN SKRIPSI.

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : DWIYATI DESTIM - DILIA KUSUMAWATI
 Nim / Jurusan / Angkatan : BIE 195 210 / PEMD. SEJARAH / 1995
 Judul Skripsi : Studi tentang peristiwa 17 Oktober 1952

Pembimbing I : _____
 Pembimbing II : Drs. Sumarno

KEGIATAN KONSULTASI

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Tl. Pembimbing
1.	Kamis, 11 September 99	Judul	h
2.	Selasa, 16 September 99	Metrik dan daftar isi	h h
3.	Selasa, 30 Nopember 99	Bab I.	h h
4.	Kamis, 16 Desember 99	Bab II.	h h
5.	Kamis, 24 Februari 2000	Bab II.	h h
6.	Selasa, 11 April 2000	Revisi BAB I, II, III	h h
7.	Celasa, 23 April 2000	BAB IV dan V.	h h
8.	Sabtu, 8 Juli 2000	BAB I, II, III, IV dan V.	h
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN SKRIPSI.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(RINGKAS)**

A. Identitas

1. Nama : Dwiana Destim Dilia Kusumawati
2. Tempat/tanggal lahir : Bondowosa/6 Desember 1976
3. Agama : Islam
4. Status : Belum Kawin
5. Nama Ayah : Soeparno
6. Nama Ibu : Titiek Khatarina
7. Agama Orang Tua : Islam
8. Pekerjaan Ayah : POLRI
9. Pekerjaan Ibu : Guru
10. Alamat : Asbrim Kl-3 Yon B, C-13, Tenggarang Bondowoso

B. Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1.	SDN Tenggarang 1	Bondowoso	1989
2.	SMPN 1	Bondowoso	1992
3.	SMAN 3	Bondowoso	1995

C. Kegiatan Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1.	Pramusa	Bondowoso	1987
2.	Kopsis SMAN 3 Bondowoso	Bondowoso	1993
3.	OSIS SMAN 3 Bondowoso	Bondowoso	1992
4.	HMP Pendidikan Sejarah FKIP	Jember	1995